

SEJARAH BERDIRINYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Lembaga yang melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di lihat sejarah perkembangan dapat diketahui dari dasar pembentukan lembaganya, yaitu Undang - Undang tentang Pemerintahan Daerah. pada masa Orde Baru dikeluarkan ketentuan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah.

Di daerah dibentuk instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan dekonsentrasi di bidang politik yaitu Kantor Sosial dan Politik. Pada masa Orde Reformasi keluarlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan peraturan pelaksanaannya, di bentuk Kator Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas), yang merupakan gabungan dari lembaga sebelumnya, yaitu Kantor Sosial Politik dan Kantor Mawil Hansip.

Selanjutnya dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah peraturan pelaksanaannya, dibentuk lembaga yang menangani urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik serta perlindungan masyarakat, yaitu lembaga yang nomenklaturnya masih sama, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas).

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tantang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya, maka perangkat daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) berubah menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Lembaga ini efektif berlaku pada awal tahun 2017. Pada Tahun 2019 Fungsi Perlindungan Masyarakat dialihkan ke Kantor Satuan Polisi Pamongpraja.